

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengendalian Internal

Teori yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes menjelaskan bahwa pengendalian yang baik tentu memenuhi lima komponen, salah satunya terdapat didalam lingkungan pengendalian dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab. Setiap bagian perusahaan dalam keadaan apapun tentu tidak boleh ikut campur dalam menjalankan tugas dan wewenang.³¹

1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal memainkan peran penting dalam praktik audit internal karena auditor internal dapat dianggap sebagai spesialis dalam pengendalian manajemen. Auditor internal akan menilai efektivitas pengendalian internal yang merupakan fungsi auditor internal dan juga mencakup penilaian aktivitas manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi hasil yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan.³²

Adapun definisi pengendalian internal menurut *Committee of sponsoring Organizations (COSO)* adalah sebagai berikut:³³

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide

³¹ Sukrisno Agoes, *Auditing Jilid 1*, (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2008)

³² Musika, dkk, *Evaluation of Internal Control Efficiency in Finance Departement of RMUTI Sakon Nakhon Campus*, 2014,World Journal of Social Sciences

³³ COSO, *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission Internal Control-Integrated Framework*, (online). www.coso.org. Diakses pada 18 Maret 2021 pukul 15:00

reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories”

- a. Effectiveness and efficiency of operations*
- b. Reliability of financial reporting*
- c. Compliance with applicable laws and regulations.”*

“Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel entitas lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan pelaporan keuangan, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”³⁴

Mardi menjelaskan pengendalian internal dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pengendalian internal disamakan dengan *internal check* yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Sedangkan dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan *management control*, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.³⁵ Sedangkan menurut Steinbart dan Romney, pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen.³⁶

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu alat yang dapat digunakan manajemen perusahaan, organisasi maupun entitas dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal dapat membantu perusahaan, organisasi maupun entitas dalam mengamankan hartanya, membantu memberikan keyakinan bahwa apa

³⁴ COSO, *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission Internal Control-Integrated Framework*, (online). www.coso.org. Diakses pada 18 Maret 2021 pukul 15:00

³⁵ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014) hal.59

³⁶ Romney dan Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta:Salemba Empat, 2015) hal.226

yang dilaporkan benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta membantu mencapai pelaksanaan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan.

2. Kerangka Pengendalian Internal

Kerangka kerja COSO dirancang untuk digunakan oleh organisasi dalam menilai keefektifan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan sebagaimana ditentukan oleh manajemen. Kerangka COSO 2013 mencakup tiga tujuan yang serupa dengan kerangka 1992, yaitu :³⁷

- a. Tujuan Operasional - terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk sasaran kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga asset dari kerugian.
- b. Tujuan Pelaporan – terkait dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal kepada pemangku kepentingan yang akan mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh pembuat standar atau kebijakan entitas.
- c. Tujuan kepatuhan – terkait dengan mematuhi hukum dan peraturan yang harus diikuti entitas.

Menurut COSO pengendalian internal dibagi kedalam lima komponen pengendalian sebagai berikut :³⁸

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian internal meliputi sikap dari manajemen dan karyawan perusahaan tentang pentingnya sebuah

³⁷ COSO, *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission Internal Control-Integrated Framework*, (online). www.coso.org. Diakses pada 18 Maret 2021 pukul 15:00

³⁸ Ibid

pengendalian internal dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian adalah faktor-faktor yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, kompetensi, filosofi dan gaya manajemen. Gaya manajemen meliputi cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, serta perhatian dan arahan yang dilakukan oleh pimpinan.

Lingkungan pengendalian merupakan dasar efektivitas unsur-unsur pengendalian internal bagi yang lainnya. Indikator dari lingkungan pengendalian meliputi (a) integritas dan nilai etika, (b) filosofi manajemen dan gaya operasi, (c) cara manajemen menentukan wewenang dan tanggung jawab, (d) kebijakan dan praktik sumber daya manusia, (e) perhatian dan arahan yang diberikan dewan direksi.³⁹

b. Penilaian Risiko

Setiap koperasi harus menyadari dan menghadapi risiko. Koperasi harus menetapkan tujuan dengan kegiatan keuangan serta kegiatan lainnya agar dapat beroperasi secara terkoordinasi. Koperasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko terkait. Dengan adanya penilaian risiko dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang diperlukan untuk meminimalkannya.

³⁹ Romney dan Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta:Salemba Empat, 2015), hal.230

COSO menyebutkan bahwa risiko dari suatu usaha dapat bersumber dari :⁴⁰

- 1) Tindakan tidak sengaja seperti kesalahan yang disebabkan dari kecerobohan karyawan, kegagalan karyawan untuk mengikuti prosedur tertentu, karyawan yang tidak atau kurang terlatih, kesalahan yang tidak sengaja dalam mengcopy data, sistem yang tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Tindakan sengaja seperti sabotase dan pencurian oleh karyawan
- 3) Bencana alam atau kerusakan politik seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dll
- 4) Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer

Terdapat beberapa indikator dari komponen penilaian risiko yang meliputi (a) identifikasi risiko, (b) analisis risiko, dan (c) evaluasi risiko.⁴¹

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal seperti personel yang kompeten, mutasi tugas, cuti wajib, pelimpahan tanggung jawab, pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan asset, dan operasi. Menurut COSO aktivitas pengendalian terdiri dari tiga kelompok tujuan yaitu :⁴²

⁴⁰ COSO, *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission Internal Control-Integrated Framework*, (online). www.coso.org. Diakses pada 18 Maret 2021 pukul 15:00

⁴¹ Romney dan Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta:Salemba Empat, 2015), hal.231

⁴² Ibid

- 1) Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong akurasi seperti : pemisahan tugas dan fungsi, otorisasi yang memadai, dokumentasi yang layak, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan akuntansi, verifikasi independen atau review atas kegiatan/kinerja
- 2) Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong kinerja seperti : evaluasi kinerja
- 3) Aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mendorong kehandalan proses informasi seperti : pengendalian umum dan pengendalian aplikasi atau khusus.

Indikator dari komponen aktivitas pengendalian meliputi (a) penyetujuan, (b) otorisasi, (c) verifikasi, (d) rekonsiliasi, (e) review terhadap performa operasi, (f) keamanan terhadap asset, dan (g) pemisahan tugas.⁴³

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi memuat tentang informasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan yang diperlukan oleh manajemen. Informasi harus diproses, diidentifikasi, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

Indikator dari komponen informasi dan komunikasi meliputi (a) intelegensi *review* competitor, (b) pengolahan data akuntansi

⁴³ Romney dan Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta:Salemba Empat, 2015), hal.231

menggunakan alat elektronik, (c) informasi *ter-update*, (d) pencatatan yang tepat dan akurat, (e) informasi yang mudah diakses.

e. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan bertujuan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Indikator dari komponen pemantauan meliputi (a) saran perbaikan, (b) pengambilan tindakan koreksi, (c) eksistensi pelanggan, (d) pengamanan dan pemantauan akun keuangan, dan (e) evaluasi dan survey customer.⁴⁴

3. Konsep-Konsep Dasar Pengendalian Internal

Konsep-konsep dasar pengendalian internal antara lain :⁴⁵

a. Pengendalian internal merupakan proses. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

⁴⁴ Abdul Halim, *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, jilid 1 Edisi kelima, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2015), hal 221

⁴⁵ A.james hal, *Sistem Informasi Akuntansi buku 1 edisi 4*, (Jakarta:Salemba Empat,2009), hal.181

- b. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personal lain.
- c. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua struktur pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
- d. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.⁴⁶

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep dasar pengendalian internal terdiri dari empat hal yaitu pengendalian internal merupakan suatu proses, pengendalian internal dijalankan oleh manusia, pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai dan bukan keyakinan mutlak serta pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

4. Tujuan dari Pengendalian Internal

Tujuan utama dari pengendalian internal organisasi adalah untuk memberikan manajemen jaminan bahwa informasi keuangan akurat

⁴⁶ A.james hal, *Sistem Informasi Akuntansi buku 1 edisi 4*, (Jakarta:Salemba Empat,2009), hal.181

dan dapat diandalkan. Hal tersebut juga ditujukan supaya seluruh elemen organisasi selalu mematuhi kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan kesepakatan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern yang efektif maka organisasi dapat melakukan pengamanan asset dari kehilangan dan pencurian serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis dan efisien. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴⁷

Menurut Sukrisno Agus terdapat 3 (tiga) tujuan dari pengendalian internal yaitu:⁴⁸

a. Keandalan Pelaporan Keuangan

Keandalan pelaporan keuangan yang dimaksud adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi serta menghindari timbulnya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari kegiatan keuangan perusahaan serta informasi mengenai keuangan perusahaan apakah perusahaan berada dalam kondisi surplus atau defisit.

b. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Dengan diterapkannya pengendalian internal yang baik dan dipatuhi akan tercapai efektivitas dan efisiensi operasi. Pengelolaan keuangan koperasi yang sesuai dengan pengendalian internal tidak

⁴⁷ A.james hal, *Sistem Informasi Akuntansi buku 1 edisi 4*, (Jakarta:Salemba Empat,2009), hal.181

⁴⁸ Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik*, Buku 1 Edisi 5, (Jakarta:Salemba Empat, 2017)

terlepas dari kompetensi dan kewirausahaan pengelola dalam menjalankan praktik-praktik yang sehat dalam usahanya.

c. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Dengan dipatuhinya pengendalian internal menjamin dipatuhinya kebijakan dan peraturan yang berlaku. Menghindari ketidaksesuaian pelaksanaan dengan praktik dan operasional perusahaan.

5. Keterbatasan Pengendalian Internal

Terdapat lima keterbatasan atas pengendalian internal yaitu sebagai berikut :⁴⁹

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

b. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

c. Kolusi

Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut sebagai kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi

⁴⁹ Mulyadi, Sistem Akuntansi: Edisi Ketiga Cetak Keempat, (Jakarta:Salemba Empat, 2013) hal. 181

kekayaan entitas dan tidak teringkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang.⁵⁰

d. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajer melaporkan jumlah laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapat bonus lebih tinggi.

e. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal.⁵¹

B. Piutang

1. Pengertian Piutang

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Mulyadi, Sistem Akuntansi: Edisi Ketiga Cetakan Keempat, (Jakarta:Salemba Empat, 2013) hal. 181

Kieso et al menyatakan bahwa “*Receivables are claims held against customers and others for money, goods, or services*” yang artinya “Piutang adalah klaim yang ditahan terhadap pelanggan dan orang lain atas uang, barang, atau jasa.”⁵² Piutang adalah klaim suatu perusahaan pada pihak lain.⁵³ Selain menurut Martani adapun piutang menurut Hery adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain.⁵⁴

Piutang didefinisikan sebagai jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seorang atau perusahaan lain.⁵⁵ Melengkapi pendapat para ahli di atas, Warren, Reeve, and Fess menambahkan bahwa yang disebut piutang (*receivable*) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya.⁵⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan.

2. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang

⁵² Kieso et al, *Intermediate Accounting: Second edition*, (New York: John Willey & Sons, Inc, 2014)

⁵³ Dwi Martani, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2012)

⁵⁴ Hery, *Akuntansi Dasar 1 dan 2*, (Jakarta:CAPS, 2013)

⁵⁵ Kieso et al, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta:CPAS, 2013)

⁵⁶ Warren, Reeve, and Fess, “*Accounting*”, Twentieth edition,(New York:South Western,2008) hal.346

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilator belakang oleh sejarah. Pada dasarnya, perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena perjanjian lain.

a. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini adalah tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang.

b. Karena perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

3. Penggolongan Piutang Koperasi

Pada koperasi terdapat begitu banyak jenis piutang yang dimiliki. Menurut Rudianto piutang dalam koperasi dapat digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis dan asalnya yaitu:⁵⁷

a. Piutang Anggota

Piutang anggota adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan koperasi kepada anggota koperasi. Pada kegiatan normal koperasi, piutang anggota biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang anggota dikelompokkan ke dalam aktiva lancar.

⁵⁷ Rudianto, *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*, (Jakarta:Erlangga, 2010)

b. Piutang Bukan Anggota

Piutang bukan anggota adalah piutang yang timbul akibat koperasi melakukan transaksi kredit kepada bukan anggota koperasi. Piutang ini mencakup piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan produk koperasi. Sementara piutang bukan usaha adalah piutang yang timbul bukan dari aktivitas usaha koperasi, termasuk dalam kelompok berikut:

- 1) Persekot dalam kontrak pembelian
- 2) Klaim terhadap perusahaan angkutan atas barang yang rusak atau hilang
- 3) Klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggung jawabkan
- 4) Klaim terhadap karyawan koperasi
- 5) Klaim terhadap restitusi pajak
- 6) Piutang dagang

c. Piutang Karyawan

Piutang karyawan adalah tagihan koperasi kepada karyawan koperasi. Pembayaran piutang karyawan biasanya dilakukan melalui pemotongan gaji pada bulan berikutnya.

4. Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan piutang mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi.⁵⁸

Pengakuan piutang dagang menurut Kieso adalah sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang terutang dari debitur (seorang peminjam) dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, biasanya berupa faktur (*invoice*).⁵⁹

Sedangkan menurut Skousen pengakuan piutang usaha adalah pengakuan pendapatan pada umumnya berhubungan dengan pengakuan piutang usaha. Oleh karena pendapatan umumnya dicatat ketika proses menghasilkan selesai dan janji pembayaran yang valid diterima, maka selanjutnya piutang usaha yang timbul dari penjualan barang secara umum ketika kepemilikan barang dialihkan ke pembeli yang terpercaya.⁶⁰

⁵⁸ Kieso *et al*, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta:CPAS, 2013)

⁵⁹ Kieso *et al*, *Intermediate Accounting: Second edition*, (New York: John Willey & Sons, Inc, 2014)

⁶⁰ Skousen *et al.*, *Studi Financial Statement Fraud Pada Perbankan, Accounting Analysis Journal*, (Unnes Journal, 2009)

Tabel 2.1
Jurnal Pengakuan Piutang

Keterangan	Jurnal
Ayat jurnal untuk mengakui piutang atas penjualan barang atau jasa	Piutang Dagang Rp xxx Penjualan Rp xxx
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran piutang dengan mendapatkan diskon	Kas Rp xxx Diskon Penjualan Rp xxx Piutang Dagang Rp xxx
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran piutang tanpa mendapat diskon	Kas Rp xxx Piutang Dagang Rp xxx

Sumber: Data yang diolah, 2016

Pengakuan piutang simpan pinjam dalam koperasi terjadi jika koperasi memberikan pinjaman kepada anggota koperasi sehingga koperasi memiliki hak klaim kepada anggota tersebut. Pengakuan piutang simpan pinjam menurut Rudianto adalah piutang simpan pinjam diakui sebesar jumlah bruto (nilai jatuh tempo).⁶¹

Tabel 2.2
Jurnal Pengakuan Piutang Simpan Pinjam

Keterangan	Jurnal
Ayat jurnal untuk mengakui piutang simpan pinjam	Piutang Anggota Rp xxx Kas Rp xxx
Ayat jurnal pada saat pembayaran piutang simpan pinjam dengan bunga	Kas Rp xxx Piutang Anggota Rp xxx Pendapatan Bunga Rp xxx

Sumber: Rudianto (2010:126)

5. Unsur-Unsur Piutang

Menurut Kasmir unsur-unsur yang terdapat pada transaksi kredit adalah :⁶²

⁶¹ Rudianto, *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*, (Jakarta:Erlangga, 2010)

⁶² Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi piutang bahwa piutang yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyidikan kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah permohonan piutang.

b. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan dalam piutang juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi piutang dengan penerima piutang. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka Waktu

Setiap piutang yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian piutang yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.⁶³

d. Risiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian piutang. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian piutang maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja

⁶³ Ibid

oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian piutang atau jasa yang sering dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi piutang ini merupakan keuntungan bank.

6. Tujuan Piutang

Tujuan dari pemberian piutang adalah sebagai berikut :⁶⁴

a. Mencari keuntungan

Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian piutang. Hasil pemberian piutang berupa bunga sebagai balas jasa atas pinjaman dan biaya administrasi piutang yang dibebankan kepada penerima piutang.

b. Membantu usaha nasabah atau penerima piutang

Membantu usaha nasabah dengan cara membiayai usaha anggotanya yang bertujuan untuk dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak piutang yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan maka akan semakin baik, mengingat

⁶⁴ Rudianto, *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*, (Jakarta:Erlangga, 2010)

semakin banyak piutang berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

7. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Munawaroh untuk mencapai efektivitas kredit perbankan perlu menerapkan prosedur pemberian kredit yang efektif.⁶⁵ Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prioritas kredit telah tepat sasaran. Prosedur pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan kredit
- b. Analisis kredit
- c. Keputusan kredit
- d. Perjanjian kredit
- e. Pencairan kredit

C. Pengendalian Internal Pemberian Piutang

Pengendalian internal pemberian piutang menurut Mulyono yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan koperasi dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipengaruhinya kebijakan-kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.⁶⁶

⁶⁵ Khusnul Khotimah, Skripsi:”Efektivitas Pengendalian Internal Kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Jember” (Jember:UNEJ,2015), hal.23

⁶⁶ Mulyono, *Sistem Akuntansi Cetakan Ketiga* (Jakarta:Salemba Empat, 2001) hal.460

Pengendalian internal pada pemberian piutang dapat dilakukan oleh dua bagian yang berwenang, yaitu pengendalian oleh direksi atau pejabat dan satuan pengendalian intern.⁶⁷

1. Pengendalian oleh Direksi atau Pejabat Koperasi

Pengendalian yang dilakukan oleh Direksi atau Pejabat yang menangani perkreditan secara berjenjang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut :

- a. Memantau dan mengawasi proses pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pemantauan debitur, penanganan kredit bermasalah, dan penyelesaian kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberi peringatan dini kepada pejabat atau pegawai terkait apabila ditemukan kualitas kredit debitur berpotensi mengalami penurunan.
- c. Memantau dan mengawasi secara khusus atas pemberian kredit kepada pihak yang terkait.
- d. Melakukan evaluasi atas pegawai yang menempati jenjang jabatan di bidang perkreditan dengan kompetensinya.
- e. Mengawasi perilaku pegawai perkreditan, apabila terjadi pelanggaran.
- f. Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi dan manajemen perkreditan.

2. Satuan Pengendalian Internal

⁶⁷ Ibid

Tugas dan wewenang satuan pengendalian internal adalah :

- a. Melakukan pengecekan terhadap berkas permohonan kredit dan berkas kredit yang telah dicairkan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas proses pemberian kredit.
- c. Melakukan pemeriksaan atas angsuran kredit.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pelunasan kredit.
- e. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap jaminan.
- f. Melakukan konfirmasi terhadap debitur.
- g. Dalam rangka pengawasan terhadap kredit bermasalah, bersama-sama dengan bagian terkait melakukan pemeriksaan *on site* maupun *off site*.
- h. Mengkoordinasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal.
- i. Membuat laporan hasil pemeriksaan rutin kepada direksi.⁶⁸

D. Penyisihan Piutang

Menurut Sari et al, terdapat tiga cara untuk menaksir jumlah penyisihan piutang tak tertagih yaitu:

1. Penyisihan atas Dasar Saldo Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih yang didasarkan atas saldo piutang dapat dilakukan dengan jalan menetapkan suatu presentase terhadap saldo piutang. Biasanya saldo yang dipakai adalah rata-rata antara saldo awal piutang pada awal dan akhir periode. Jumlah penyisihan tersebut harus muncul di neraca sebagai saldo pos penyisihan piutang tak tertagih. Selain berdasarkan rata-rata saldo piutang pada awal dan

⁶⁸ Ibid

akhir periode, penyisihan piutang tak tertagih juga dapat dihitung atas dasar presentase tertentu, terhadap golongan umur piutang pada akhir periode. Dalam keadaan demikian, pada akhir periode perlu dibuat daftar umur piutang (*aging receivable*).

2. Penyisihan atas Dasar Saldo Penjualan

Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dengan cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu presentase tertentu terhadap penjualan. Sebisa mungkin angka penjualan yang dipakai adalah penjualan kredit. Akan tetapi, apabila untuk memperoleh angka tersebut diperlukan terlalu banyak waktu dan biaya maka presentase dapat juga didasarkan atas total penjualan.

3. Analisis Umur Piutang

Risiko tidak tertagih pada piutang yang sudah lewat jatuh tempo tentu lebih besar daripada yang belum jatuh tempo. Piutang yang telah lewat jatuh tempo lebih lama memiliki risiko tak tertagih lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah jatuh tempo lebih sebentar. Oleh karena itu, perusahaan menyusun daftar umur piutang masing-masing nasabah.⁶⁹

E. Penelitian Terdahulu

Eko Suyono (2011) Dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Unit Desa “X” di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa komponen-komponen

⁶⁹ Sari et al., *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hal.339

pengendalian intern yang sesuai dengan kerangka kerja COSO 2013 yang meliputi lingkungan pengendalian, risiko pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring ada dan sudah berjalan efektif pada KUD “x”. persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel pengendalian internal. Perbedaannya ada pada lokasi dan waktu penelitian, penelitian Eko pada KUD di Kecamatan Banyumas sedangkan penelitian sekarang pada USP Tani Wilis di Sendang.⁷⁰

Novi Khoiriawati dan Zuni Barokah (2019) Dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang (Studi Pada PT X)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengendalian internal atas piutang di PT X telah dilaksanakan dengan skor sebesar 71,21% dan terdapat beberapa hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada PT X tahun 2019 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang.⁷¹

Anisa Dian (2017) Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Koperasi Serba Usaha Citra Politeknik Negeri Malang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada KSU Citra Polinema sudah memenuhi kriteria dari komponen kerangka kerja-ERM yang dikembangkan oleh COSO. Hanya

⁷⁰ Eko Suyono, 2011, “Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Unit Desa “X” di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Volume 9 Nomor 01 Maret 2011

⁷¹ Novi Khoiriawati dan Zuni Barokah, 2019, “Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang (Studi Pada PT X)”, *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 9 No. 1, Juni 2019

saja masih perlu pembenahan di komponen penetapan wewenang dan tanggung jawab, prosedur pengamanan asset, catatan dan dokumen, serta penggunaan sistem komputerisasi berbasis program. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ada pada variabel penerapan pengendalian internal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini pada KSU sedangkan penelitian sekarang pada USP.⁷²

Wasito, dkk (2017) Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Pada KPRI Universitas Jember”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa pelaksanaan pengendalian internal di KP-RI Universitas Jember pada umumnya sudah berjalan efektif dan dibuktikan dengan terpenuhinya komponen pengendalian internal menurut COSO. Namun ada beberapa pembenahn yang perlu dilakukan antara lain pada penambahan dukungan SDM, Update Sistem informasi dan teknologi terbaru. Persamaan dengan penelitian sekarang ada pada metode penelitian dan variabel pengendalian internal. Perbedaan dengan penelitian sekarang terdapat pada permasalahan yang diambil, penelitian ini mengambil permasalahan pengendalian internal kredit, sedangkan penelitian sekarang mengambil permasalahan pengendalian internal kegiatan operasional serta hambatan pelaksanaan pengendalian internal.⁷³

Riska S. Papalangi (2013) Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas

⁷² Anisa Dian, 2016, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Koperasi Serba Usaha Citra Politeknik Negeri Malang”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya

⁷³ Wasito, dkk, *Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Pada KPRI Universitas Jember*, (Jember:Universitas Jember,2017)

Pemberian Kredit UKM pada PT. BRI Tbk Manado”. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemberian kredit pada UKM yang dilakukan oleh PT. BRI Tbk Cabang Manado sudah baik karena sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal.

Bagus Nugroho Susanto (2016) Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Piutang dan Akuntansi Penjualan Kredit Terhadap Efektivitas Penagihan Piutang Pada PT. Usaha Lantang Sejahtera Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan sistem pengendalian internal piutang dan akuntansi penjualan kredit berpengaruh terhadap efektivitas penagihan piutang. Persamaannya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel pengendalian internal piutang. Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dengan tambahan variabel akuntansi penjualan kredit dan efektivitas penagihan piutang, penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.⁷⁴

Abdul Latif dan Yuningsih (2017) Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Piutang Pada Amanah Finance Cabang Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern piutang berperan dalam meningkatkan pengelolaan

⁷⁴ Bagus Nugroho, 2016, “Pengaruh sistem pengendalian internal piutang dan akuntansi penjualan kredit terhadap efektivitas penagihan piutang pada PT. Usaha Lantang Sejahtera Jakarta”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3 No.3 Tahun 2016

piutang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel pengendalian intern piutang. Perbedaan penelitian sebelumnya pada amanah finance cabang Gorontalo sedangkan penelitian sekarang pada koperasi simpan pinjam Tani Wilis Sendang.⁷⁵

Muhamad Firdaus (2016) Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peranan Audit Dalam Meningkatkan Efektivitas Prosedur Penagihan Piutang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit berperan terhadap efektivitas prosedur penagihan piutang usaha. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel piutang. Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan variabel internal audit sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel pengendalian internal.

Lisda Siswanti (2017) Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pengendalian internal terhadap tingkat kelancaran penagihan piutang usaha produk kreasi pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kelancaran penagihan piutang usaha produk kreasi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengendalian internal. Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.⁷⁶

⁷⁵ Abdul Latif, 2016, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Piutang Pada Amanah Finance Cabang Gorontalo”, *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, Vol 1 No. 2 Tahun 2016

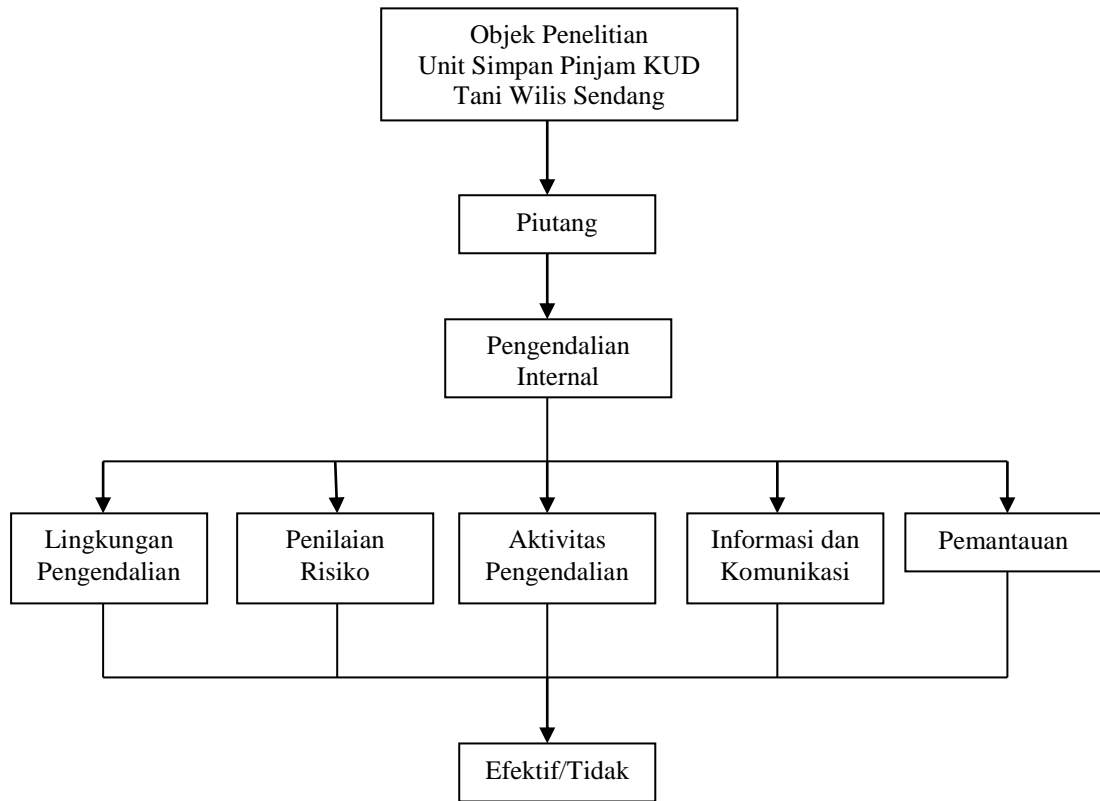
⁷⁶ Lisda Siswanti, 2016, “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Kelancaran Penagihan Piutang Usaha Produk Kreasi Pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung”, *Jurnal Ekonomi Universitas Widyatama*

Aziza Andini Putri (2015) Dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Pengendalian Internal Piutang Usaha Dalam Menunjang Efektivitas Penagihan Piutang Usaha”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan kuat dalam menunjang efektivitas penagihan piutang usaha. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengendalian internal piutang. Perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi penelitian.⁷⁷

⁷⁷ Aziza Andini, 2015, “ Peranan Pengendalian Internal Piutang Usaha Dalam Menunjang Efektivitas Penagihan Piutang Usaha”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah peneliti

Keterangan :

Penelitian ini dilakukan pada Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang Tulungagung yang merupakan koperasi yang menyediakan layanan utang piutang. Penelitian yang dilakukan berfokus pada pengendalian internal piutang di Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan guna mencapai tujuan perusahaan. Penelitian dimulai dengan peneliti melihat kegiatan operasional pengelolaan piutang di Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang Tulungagung, setelah dilihat dan dianalisis pengendalian internal piutang di

Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang Tulungagung sudah dilaksanakan namun belum efektif.

Dalam penerapannya terdapat beberapa komponen dari pengendalian internal yang belum dilaksanakan, seperti halnya pada komponen lingkungan pengendalian Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang belum mempunyai pedoman nilai etik yang diterapkan untuk seluruh karyawannya, serta pada komponen aktivitas pengendalian di Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang masih terdapat fungsi ganda yang dilakukan oleh petugas penagih piutang juga menjalankan fungsi pemasaran. Hal tersebut yang membuat pengendalian internal di Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wilis Sendang sudah terlaksana namun belum efektif.